Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

RENCANA STRATEGIS PTKI MEDAN TAHUN 2020-2024 REVIU II

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
Jln. Medan Tenggara VII Medan 20228, Medan Telp. (061) 7867810 Fax. (061) 7862439

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 351 /BPSDMI/PTKI/Kep/XII/2021

T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (REVIU II)
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN 2020 - 2024

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
c. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/7/2014 tentang pemberian wewenang bidang pembinaan pendidikan pada perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (REVIU II) POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN 2020-2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra PTKI Medan adalah dokumen perencanaan pembangunan pendidikan tinggi vokasi industri di PTKI Medan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Renstra Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Poin 1(satu) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh PTKI Medan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis PTKI Medan.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2021

DIREKTUR POLITEKNIK TEKNOLOGI
KIMIA INDUSTRI MEDAN

POLTAK EVENCUS HUTAJULU

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. *Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI (sebagai laporan);*
2. *Ketua Senat;*
3. *Pembantu Direktur I, II, III;*
4. *Ketua Satuan Penjamin Mutu Internal;*
5. *Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan;*
6. *Ka. Sub. Bag Adm. Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama;*
7. *Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;*
8. *Ketua UPPM;*
9. *Pertinggal.*

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Terjadinya perubahan organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian perindustrian, maka Kementerian Perindustrian melakukan penyelarasan atas Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian perindustrian Tahun 2020-2024.

Dan oleh karena itu, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan sabagai satuan kerja di bawah di bawah Kementerian Perindustrian juga perlu menyelaraskan rencana strategisnya dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian perindustrian.

Rencana Strategis Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan Tahun 2020-2024 telah direviu pertama kali tahun 2021. Oleh karena itu, dokumen rencana strategis ini merupakan Rencana Strategis PTKI Medan Tahun 2020-2024 Reviu II. Dokumen rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dimiliki oleh PTKI Medan yang menjadi arah dalam pengembangan organisasi PTKI Medan. Rencana Strategis ini menjadi kerangka dalam mengimplementasikan Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi sesuai tugas dan fungsi Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi sehingga dapat mendukung program Kementerian Perindustrian dalam peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Rencana strategis (renstra) memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungi Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

Medan, 27 Desember 2021
Direktur PTKI Medan

POLTAK LEVENCUS HUTAJULU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB 1 Pendahuluan 1
1.1. Kondisi Umum 1
a. Pembangunan Industri Nasional 1
b. Pembangunan SDM Industri 5
c. Pembangunan Pendidikan Vokasi 10
1.2. Potensi dan Permasalahan 12
a. Peluang dan Tantangan Industri Kelapa Sawit 12
b. Tantangan Pendidikan Vokasi Bertaraf Global Menuju *Corporate University* BPSDMI 15
c. Tantangan PTKI Medan sebagai Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang Menghasilkan SDM Industri Kompeten 17
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program 20
2.1. Visi PTKI Medan 2020-2024 20
2.2. Misi PTKI Medan 2020-2024 20
2.3. Tujuan PTKI Medan 2020-2024 20
2.4. Sasaran Strategis PTKI Medan 2020-2024 21
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI 2020-2024 27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTKI Medan 2020-2024 32
3.3. Kerangka Regulasi 36
3.4. Kerangka Kelembagaan 37
BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 40
4.1. Target Kinerja 40
4.2. Kerangka Pendanaan 41
BAB 5 Penutup 45
Lampiran 46
Lampiran 1a. Pohon Kinerja PTKI Medan 47
Lampiran 1b. Cascading Kinerja pada PTKI Medan 48
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja 50
Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis 52
Lampiran 4 Pedoman Kinerja 62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

a. Pembangunan Industri Nasional

Daya saing (*competitiveness*) merupakan sebuah konsep multidimensional. Dapat dilihat dari tiga tingkatan yang berbeda: negara (*country*), industri, dan tingkat perusahaan. Daya saing menjadi istilah umum untuk menjelaskan kekuatan ekonomi dari sebuah entitas yang berhadapan dengan pesaingnya dalam ekonomi pasar global dimana barang, jasa, penduduk, keahlian, dan ide bergerak dengan bebas melintasi perbatasan geografi (Muth, 1998).

Kinerja suatu bangsa dinilai dari beberapa aspek yakni: Pertama, Daya saing teknologi (Technological competitiveness). Daya saing teknologi (Technological competitiveness) mengacu kepada kemampuan berhasil dalam persaingan pada pasar untuk barang barang dan jasa baru. Dengan demikian daya saing jenis ini berhubungan erat pada tingkat inovasi sebuah negara. Tidak tersedia sumber data yang mengukur tingkat inovasi sebuah negara secara langsung. Untuk mengukur daya saing ini digunakan dimensi input ilmu pengatahuan dan variabel untuk mengukurnya digunakan Pengeluaran Riset dan Pengembangan sebuah Negara.

Kedua, Daya saing Kapasitas (Capacity competitiveness). Merupakan kapasitas superior dalam mengeksplotitasi teknologi baru untuk mempertahankan keberlanjutan dari daya saing. Daya saing kapasitas berfokus pada empat dimensi, yakni Modal Manusia (human capital), infrastruktur Komputer, Informasi, dan Teknologi, gabungan aspek sosial dan institusi. Daya saing kapasitas diukur dengan Modal Manusia, Infrastruktur Internet, Komputer, dan Teknologi, beserta dimensi Diffusi

Ketiga, Daya saing biaya (Cost competitiveness), merupakan daya saing yang paling mudah diukur, yakni harga. Secara teori daya saing ini mudah dipahami, tetapi data yang diperlukan sangat sulit. Keempat, Daya saing permintaan (Demand competitiveness), merupakan struktur relasi atau perdagangan dan komposisi permintaan. Dalam hal ini daya saing ini diukur dengan besarnyaa royalti dan lisensi yang diterima sebuah negara. Variabel yang digunakan adalah ekspor neto royalti dan lisensi. Secara sosial, Fragenberg juga mengukur aspek sosial dari daya saing. Aspek ini diukur dengan variabel indeks korupsi pada sebuah negara

Daya Saing (*Competitiveness*) merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan perusahaan untuk melakukan yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Sementara g*lobal competitiveness index* (GCI) atau indeks daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Indeks ini mengukur

seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan produktivitas faktor total/total factor productivity (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang efektif.

Dari *Diamond of Nation Advantage* yang dikemukakan oleh Porter, menyebutkan terdapat empat faktor yakni faktor conditions, *Demand conditions, Related and Supporting Industries, Firm strategy, Structure and Rivalry*. Faktor *conditions* mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan infrastruktur.

Adapun kerangka pembentuk indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain lingkungan yang mendukung/kondusif (enabling environment), modal manusia (human capital), aspek pasar (markets), dan ekosistem inovasi (innovation ecosystem). Teori Porter juga menyebutkan tentang daya saing nasional sesuai teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing / competitive advantage (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya.

Industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, namun juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Presiden RI telah menetapkan Visi Pembangunan Industri Nasional yakni Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang dicirikan dengan: 1) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan industri nasional menjalankan 7 (tujuh) misi yakni: 1) meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2) memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3) meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4) menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6) meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pemerintah menetapkan beberapa strategi agar visi dan misi pembangunan industri nasional tersebut dapat terlaksana. Hasil yang diharapkan adalah bahwa Industri nasional pada tahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
    a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional;
    b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri;
    c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
    a. mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
    b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;
    c. menguasai pasar domestik;
    d. memiliki produk unggulan industri masa depan;
    e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
    f. mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*).

Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri secara nasional.

4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah dipaparkan tentang Bangun Industri Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut:

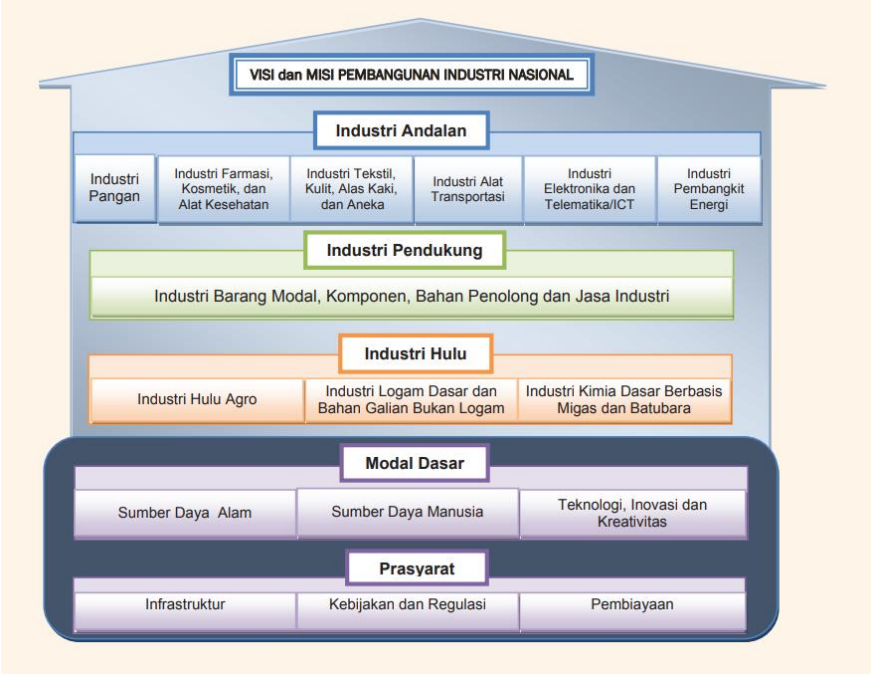

Gambar 1.1. Bangun Industri Nasional

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dituangkan dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Pembangunan industri nasional dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, Tahap I (2015-2019), Tahap II (2020-2024), dan Tahap II (2020-2024) dengan arah rencana pembangunan tiap tahapnya seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut:

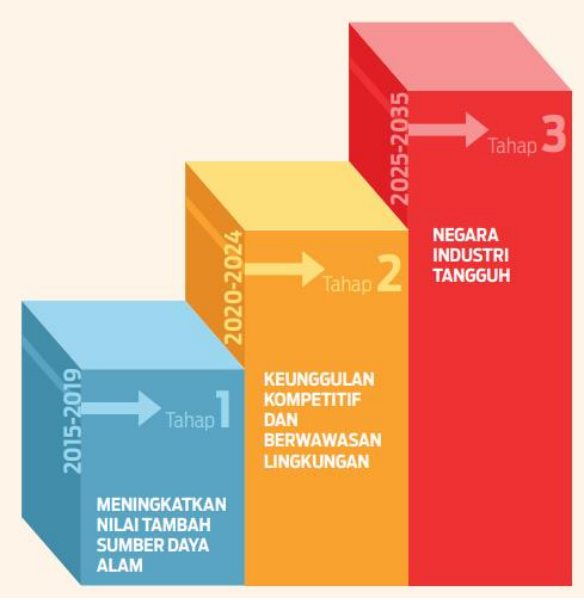

Gambar 1.2. Tahapan Pembangunan Industri Nasional

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap kedua dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3:

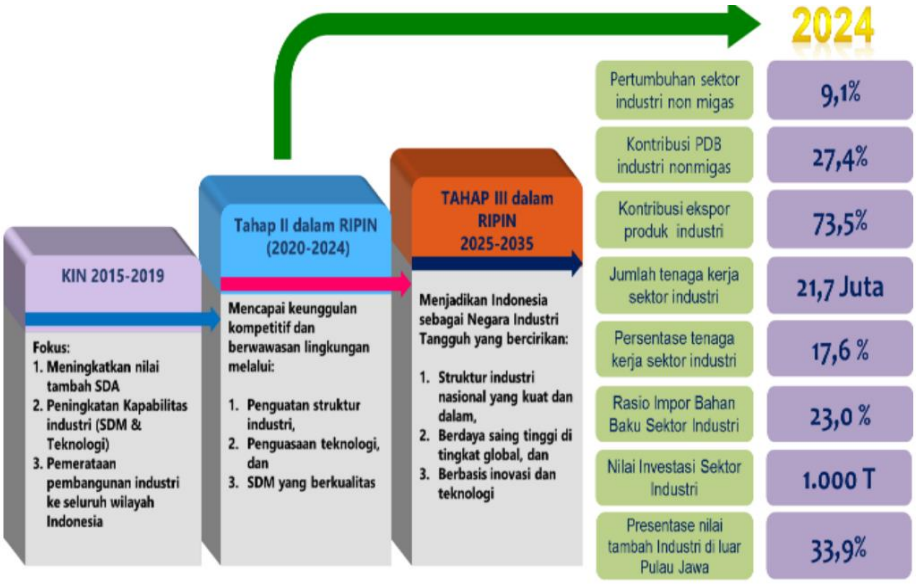

Gambar 1.3. Tahapan Dan Arah Rencana Pembangunan Industri Nasional

Dalam tahap kedua RIPIN 2015-2035 yang menjadi fokus adalah pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan SDM yang berkualitas. Implementasi RIPIN tahap II dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020- 2024. Terdapat 10 kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan di dalam KIN 2020-2024, yaitu (1) Industri Pangan, (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, (4) Industri Alat Transportasi, (5) Industri Elektronika dan Telematika, (6) Industri Pembangkit Energi, (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, (8) Industri Hulu Agro, (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; serta (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

b. Pembangunan SDM Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam;

(c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun selama periode 2015- 2035 dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, makasasaran yang akan dicapai adalahterbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianyaStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnyaLembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnyalembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

Era globalisasi membawa dampak persaingan yang semakin ketat di semua sektor kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini giat membangun segala sektor pembangunan khususnya sektor industri. Untuk melaksanakan pembangunan ini diperlukan manusia yang cerdas, profesional, di bidangnya masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya.

Hingga tahun 2019, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sektor industri non- migas sebesar 6,2% setiap tahunnya sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB. Besarnya kontribusi tersebut tercapai karena jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga

kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, hanya 21% dari Amerika Serikat. Laju pertumbuhan produktivitasnya lebih lambat dibandingkan negara ASEAN lainnya. secara Laju pertumbuhan ekonomi negara beberapa negara ASEAN tahun 2016 secara berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah: Thailand (5,28%), Vietnam (4,39%), Malaysia (2,16%), dan Indonesia (1,37%). Selain itu, tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan menengah lebih tinggi dibandingkan TPT nasional .

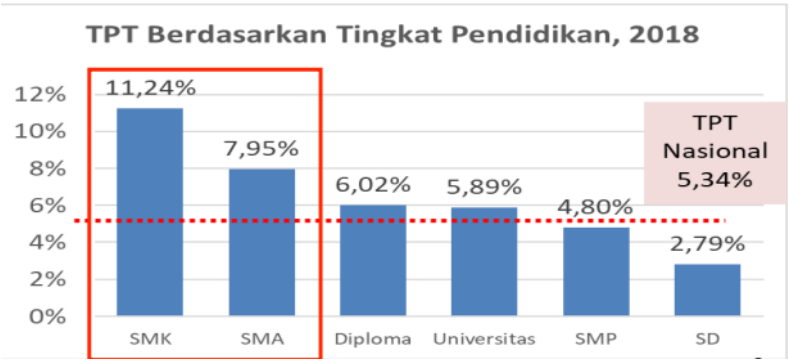

Gambar 1.4. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Sumber : Sakernas BPS, Agustus 2018

Salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya ASEAN adalah bonus demografi yang besar. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Namun sebaliknya, bila tidak dapat dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran sebagai contohnya.

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, hingga

tahun 2017 terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 121 juta bekerja tetapi lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai 87,9%. Yang masih menjadi masalah bagi pemerintah adalah jumlah pengangguran bersifat terbuka yang mencapai 7 juta jiwa di mana lebih kurang 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai kisaran 87,8%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan menyampaikan bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam pencapaian visi pembangunan Indonesia 2045. Tantangan pertama adalah Penduduk Usia Produktif Mencapai Puncak pada 2020-2024. Bonus demografi paling tinggi diperoleh pada periode 2020-2024. Oleh karena itu, periode ini menjadi periode kunci pemanfaatan bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif 174-180 juta pada 2020-2024, jumlah ini merupakan yang paling banyak di wilayah Asia Tenggara. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi.

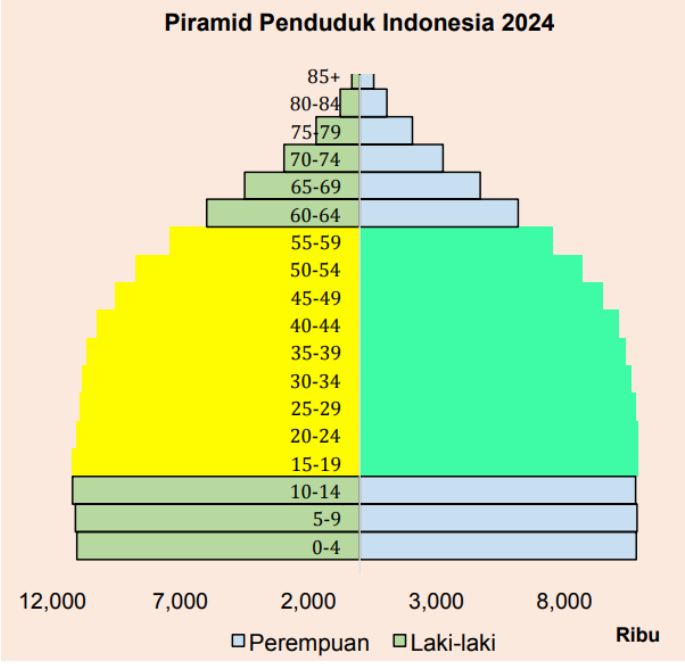

Gambar 1.5. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2024

Tantangan kedua adalah bahwa Transformasi Digital telah Menyebabkan Disrupsi di Pasar Kerja. DI masa depan dibutuhkan keahlian tinggi dan spesifik dari SDM. Demikian juga terjadi pergeseran lapangan kerja masa depan yakni: TI, Kesehatan, kreatif/seni, pengajar, serta bidang konstruksi.

Tantangan ketiga, Kondisi Pendidikan Pekerja di Indonesia saat ini adalah bahwa sebagian besar pekerja berpendidikan rendah. Lapangan kerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SMP ke bawah. Pekerja berpendidikan maksimal SMP ke bawah masih 58,77% atau 72,88 juta orang.

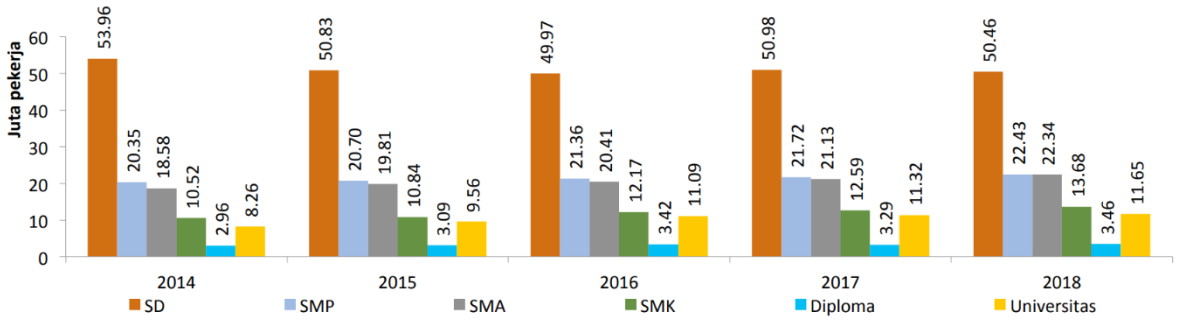

Gambar 1.6 Kondisi Pendidikan Pekerja Indonesia

Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

Pendidikan yang rendah menyebabkan pekerja tidak produktif. Untuk itu dibutuhkan strategi perbaikan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu juga perlu mendorong industri manufaktur padat pekerja.

Tantangan keempat, adalah bahwa Human Capital Index Indonesia masih rendah yakni 0,53. Indonesia berada di rangking ke 86 dari 157 Negara. Skor HCI 0,53 artinya bahwa Anak Indonesia yang lahir saat ini 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut maka Pemerintah menetapkan beberapa strategi pembangunan SDM untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.7. Strategi Pembangunan SDM Mencapai Visi Indonesia 2045

Terdapat tiga strategi yakni Strategi Peningkatan Layanan Dasar, Strategi Peningkatan Produktivitas, serta Strategi Pembangunan Karakter. Strategi Peningkatan Layanan Dasar meliputi Membentuk SDM Sehat serta Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas. Strategi Peningkatan Produktivitas dilakukan dengan **Pelibatan Industri dalam Pengembangan Vokasi,** Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi, serta Penguasaan Adopsi Teknologi dan Menciptakan Inovasi. Dan strategi Pembangunan Karakter dilakukan dengan Membangun Manusia Indonesia Berkarakter.

c. Pembangunan Pendidikan Vokasi

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, salah satu diantaranya adalah "Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten". Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:

1. penyusunan dan penetapan SKKNI;
2. pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;
3. pembentukan LSP dan TUK;
4. pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan
5. pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.

b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri(KADIN), dan perusahaan industri,melalui:

1. pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
2. pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
3. pemagangan Industri.

c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.

d. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

Kemenperin telah menjalankan berbagai program dalam upaya pengembangan SDM industri kompeten. Langkah strategis itu antara lain melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang menerapkan sistem ganda (praktik dan teori). Selain itu, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Kemenperin juga telah meluncurkan program *link and match* antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah Indonesia.

Pendidikan vokasi memiliki keterkaitan sangat erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Salah satu ciri khas dari pendidikan vokasi yakni kedekatannya dengan DUDI melalui kemitraan, baik pada proses pembelajaran, pengembangan, penguatan SDM, hingga perekrutan lulusan vokasi. Pendidikan vokasi sendiri saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. SDM vokasi yang unggul akan berpotensi menjadi pendongkrak peningkatan ekonomi nasional dan daya saing bangsa.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) diarahkan dalam upaya menopang implementasi industri 4.0. Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan inovasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menyikapi perkembangan era baru menuju revolusi Industri 4.0, dunia pendidikan khususnya pendidikan vokasi harus mempersiapkan langkah – langkah dengan perencanaan atau model pembelajaran yang mampu mengatasi kebutuhan

industri. Model pembelajaran yang dianggap mampu menjembatani antara proses pembelajaran dengan kebutuhan industri adalah *Teaching Factory*. Industri 4.0 membuat pendidikan harus mengubah strategi pendidikan. Pembelajaran *Teaching Factory* dipersiapkan untuk terciptanya lulusan yang dapat diserap oleh industri (Prasetya 2020). Mengacu dari arah strategi penyelenggaraan pendidikan vokasi seperti tersebut di atas maka perlu adanya konsep pembelajaran yang menjembatani antara kompetensi peserta didik dan kebutuhan industri dengan dibentuknya *Teaching Factory*. *Teaching Factory* merupakan konsep pembelajaran dalam keadaan sesungguhnya sehingga dapat menjembatani kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan perguruan tinggi (Sardjana 2021).

Negara-negara telah mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan agar dapat maju di masa depan. SDM unggul yang dibutuhkan di masa depan tidak bisa diciptakan oleh perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu. Indonesia akan mengalami perubahan demografis yang signifikan, Indonesia juga akan menjadi lebih berliterasi digital, stabil secara politik, dan sukses dalam memberantas kemiskinan, Indonesia juga akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja. Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045.

I.2. Potensi dan Permasalahan

a. Peluang dan Tantangan Industri Kelapa Sawit

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah dengan berbagai komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan diantaranya kakao, karet, kelapa, kopi, sawit, tebu, lada dan pala seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.

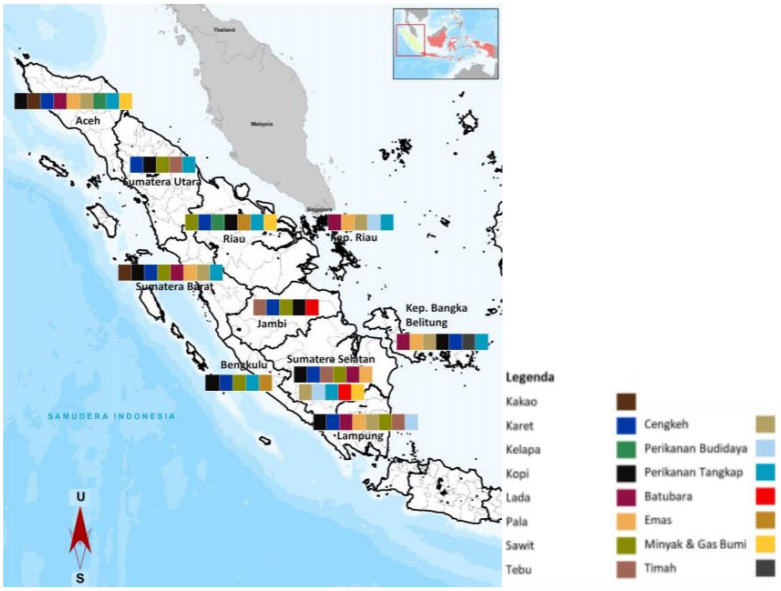

Gambar 1.8. Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera

Sumber:
Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

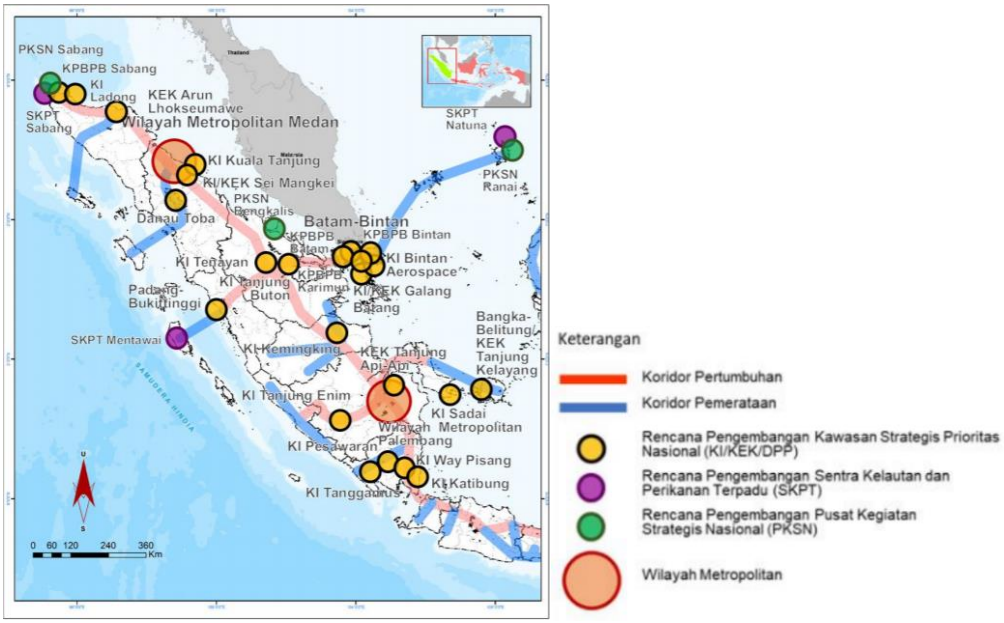

Gambar 1.9. Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera

Beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang akan dilaksakan di wilayah Sumatera umumnya dan Sumatera Utara khususnya diantaranya adalah pengembangan 9 Kawasan industri di luar Jawa, pembangunan energi terbarukan *green fue*l berbasis kelapa sawit, serta Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) dengan manfaat yang diharapkan yakni meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional. Selain itu, dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan. Dari Gambar Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera, di wilayah Sumatera Utara terdapat dua Kawasan industri/Kawasan ekonomi khusus yang menjadi prioritas yakni KI Kuala Tanjung serta KEK Sei Mangkei. Dari daftar Proyek prioritas yang akan dilaksanakan di Wilayah Sumatera Utara pada tahun 2020-2024, **kelapa sawit** menjadi salah satu komoditas unggulan yang utama.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas dari sektor pertanian yang memiliki daya tahan dan yang ikut serta menopang pertumbuhan ekonomi di Q3 tahun 2021. Industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terbesar dan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya.

Dengan luasan lahan 10% dari total *global land bank for vegetable oil*, Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55% pangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati. Selain itu juga mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia.

Luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektar dengan rincian, Perkebunan Sawit Rakyat sebesar 41%, Perkebunan Besar Negara sebesar 6%, dan Perkebunan Besar Swasta Nasional sebesar 53%.

Menko Perekonomian, AIrlangga menyebutkan bahwa Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6% dari total ekspor di tahun 2020. Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi. Hilirisasi industri minyak sawit nasional merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan jangka panjang industri minyak sawit Indonesia. Melalui hilirisasi industri minyak sawit, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan mampu merubah posisinya dari 'raja' CPO dunia saat ini, menjadi 'raja hilir' melalui tiga jalur hilirisasi, yakni *oleofood* (*oleofood complex*), *oleochemical complex*, dan *biofuel complex.* Hilirisasi minyak sawit tersebut merupakan kombinasi strategi promosi ekspor (*export promotion*) dan substitusi impor (*import substitution*). Artinya, melalui hilirisasi CPO diolah menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pengganti barang yang diimpor, seperti solar, avtur, premium, plastik, pelumas, dan sebagainya. Dengan demikian, manfaat ekonomi hilirisasi bahkan industri minyak sawit secara keseluruhan tidak hanya melihat berapa devisa yang dihasilkan dari ekspor, tetapi juga beberapa devisa yang bisa dihemat akibat dari substitusi impor.

Prioritas Pengembangan Industri Pangan berbasis Minyak kelapa Sawit seperti ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Prioritas Pengembangan Industri Pangan berbasis Minyak kelapa Sawit

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1.	INDUSTRI PANGAN	**Industri Pengolahan Minyak Nabati**		
		1.Fortified cooking oil (natural dan non-natural) 2.pangan fungsional berbasis minyak nabati	1. Industri Minyak Goreng kelapa sawit (10437) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati	1. Industri Minyak Goreng kelapa sawit (10437) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati
		Industri Oleofood		
2.	INDUSTRI HULU AGRO	1. *Olein*, 2. *stearin*, 3. *gliserol*, 4. *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD), 5. *coco butter substitute*, 6. margarin, 7. *shortening*, 8. *other specialty fats*.	1. Specialty fats (cocoa butter Alternative) (10490) 2. Betacaroten (21011) 3. Shorteningn (10490) 4. Margarine (10412)	1. Specialty fats (cocoa butter Alternative) (10490) 2. Betacaroten (21011) 3. Shorteningn (10490) 4. Margarine (10412) 5. *Specialty fats* bahan tambahan pangan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar kedua setelah Riau dengan peningkatan total luas areal tahun 1990-2017 dari 1.13 juta ha menjadi 14 juta ha. Demikian juga jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara tercatat sebanyak 329 perusahaan.

b. Tantangan Pendidikan Vokasi Bertaraf Global Menuju *Corporate University* BPSDMI

Visi Pembangunan Indonesia 2045 adalah Menjadi Negara Pendapatan Tinggi dan Ekonomi Terbesar Dunia. Dengan ciri ekonomi modern dengan tingkat kesejahteraan berkualitas dimana nilai PDB per kapita sebesar USD 23.199. Untuk mendukung visi ini diperlukan peran 3 sektor kunci yakni Sektor Industri (Pertumbuhan: 6,3% Kontribusi terhadap PDB: 26%), Sektor Pertanian (Rata-rata pertumbuhan: 3,1% Kontribusi terhadap PDB: 7%), dan Sektor Pariwisata (Kunjungan wisman 73,6 juta Penyumbang devisa terbesar). Untuk mewujudkannya maka Langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan adalah: Memanfaatkan revolusi industri 4.0 sesuai dengan karakteristik masing-masing industri untuk peningkatan efisiensi, Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, serta Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi berpengaruh pada struktur tenaga kerja. Pencapaian visi besar Indonesia tahun 2045 ini menuntut kualitas SDM, produktivitas dan penguasaan Iptek tinggi. (Sumber: Naskah Akademis Visi Indonesia 2045, BAPPENAS 2018).

Dunia menghadapi inovasi digital dan tantangan globalisasi, oleh karena itu, SDM dalam organisasi harus meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Selain itu, karena meningkatnya ketergantungan pada SDM dengan keahlian tertentu, organisasi memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi yang akan berkontribusi pada keunggulan kompetitif (Ilyas, 2017). Keunggulan kompetitif di masa lalu ditentukan oleh aset fisik/mesin dan modal, tetapi saat ini berganti menjadi aset SDM. SDM merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah link and match antara dunia pendidikan dan industri belum optimal sehingga tenaga kerja tidak terserap secara optimal. Link and match antara dunia pendidikan dan industri merupakan ciri khas dari Pendidikan vokasi.

Kunci sukses Pendidikan dan pelatihan vokasi terdapat pada 5 hal seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 1.10. Kunci Sukses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sumber: Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Pengetahuan dan pembelajaran yang diperbarui bagi individu dan organisasi diperlukan pada era inovasi digital saat ini. Clinton, Merritt, & Murray, (2009) menyarankan bahwa sebuah organisasi harus memberi para pekerjanya kemampuan untuk mengubah keterampilan dan pengetahuan mereka secara terusmenerus dan melatih diri mereka dengan keterampilan di luar pelatihan di tempat kerja. Program yang efektif untuk melakukan ini adalah "Corporate University (CorpU)". CorpU adalah entitas pendidikan yang merupakan alat strategis dan dirancang untuk membantu organisasi induk dalam mencapai misinya dengan melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan atau meningkatkan pembelajaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan baik individu maupun organisasi (Allen, 2002).

CorpU menawarkan kepada SDM kesempatan untuk menambah value pengetahuan dan keterampilan, dan selanjutnya SDM harus memberikan output untuk organisasi melalui inovasi, efisiensi, dan produktivitas. CorpU selain berguna untuk mengembangkan karier SDM juga bertujuan untuk mengembangkan bisnis. CorpU dapat menambah nilai bagi bisnis dalam hal pendapatan dan laba, peningkatan retensi pelanggan, produktivitas karyawan, pengurangan biaya, dan retensi karyawan berbakat (Ilyas, 2017). CorpU merupakan "pabrik" yang melakukan rangkaian proses pemerolehan, pembentukan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan organisasi kepada seluruh SDM. CorpU merupakan fasilitas dan strategi organisasi untuk menjadikan semua SDM belajar terus menerus (knowledged worker) dan saling berbagi pengetahuan secara berkesinambungan. CorpU memberikan kesempatan seluruh komponen organisasi untuk terlibat serta terkoneksi dalam ekosistem pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas (Khamdan, 2020) Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian adalah inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Peran strategis Kementerian Perindustrian dalam

meningkatkan produktivitas industri perlu didukung dengan SDM yang handal dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak SDM dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang link and match dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, sekolah maupun kampus Pendidikan di bawah BPSDMI Kementerian Perindustrian perlu untuk mewujudkan Corporate University sehingga dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan daya saing SDM industri.

c. Tantangan PTKI Medan sebagai Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang Menghasilkan SDM Industri Kompeten

Pendidikan vokasi memegang peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global untuk mendorong pertumbuhan industry. Kementerian Perindustrian telah menetapkan kerangka kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yakni pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju Corporate University. Kebijakan ini menjadi acuan pengembangan kelembagaan BPSDMI termasuk PTKI Medan yang harus dicapai selambat-lambatnya tahun 2030.

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan merupakan Pendidikan vokasi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian yang terletak di Jalan Medan tenggara VII, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. PTKI Medan memiliki bidang spesialisasi yakni industri kelapa sawit dan produk turunannya. Saat ini, di PTKI Medan telah terdapat *Teaching Factory* berupa Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit (PKS Mini) yang mengolah TBS menjadi CPO.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“. Dalam peta strategi Kementerian Perindustrian digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan).

Dalam dokumen rencana strategis Kementerian Perindustrian telah dijabarkan sasaran-sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang terkait dengan unit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dan secara khusus terkait dengan unit Pusat Pendidikan Vokasi Industri (PPVI). Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan merupakan salah satu unit

Pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah pembinaan PPVI – BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sasaran-sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang diturunkan menjadi Sasaran Program PPVI dan menjadi Sasaran Kegiatan di PTKI Medan diantaranya adalah "Meningkatnya Daya Saing SDM Industri" serta "Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0" dengan indikator kinerja seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Cascading Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian – BPSDMI – PTKI Medan

Sasaran Strategis **Kementerian Perindustrian**	Indikator Kinerja Sasaran Strategis **Kementerian Perindustrian**	Sasaran Program **BPSDMI**	Indikator Kinerja Program **BPSDMI**	Sasaran Kegiatan **PTKI Medan**	Indikator Kinerja Kegiatan **PTKI Medan**	Strategi **PTKI Medan**
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri	-Tenaga kerja industri yang kompeten - Persentase mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi	✓ Kurikulum berbasis kompetensi sesuai SKKNI ✓ *Dual system* ✓ *Teaching Factory* ✓ Sertifikasi Kompetensi
	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	

Dari tabel di atas terlihat bahwa target kinerja PTKI Medan di antaranya adalah menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten yang disertifikasi melalui sertifikasi/uji kompetensi, menghasilkan lulusan dengan masa tunggu bekerja tidak lebih dari satu tahun setelah kelulusan, serta mengimplementasikan industri 4.0 pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Untuk mencapai target kinerja tersebut PTKI Medan melaksanakan beberapa strategi di antaranya adalah dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai SKKNI, melaksanakan pembelajaran sistem ganda (*dual system*), menerapkan model pembelajaran *teaching factory*, serta pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan TUK untuk pelaksanaan uji/sertifikasi kompetensi lulusan.

Model Pembelajaran Teaching Factory merupakan model pembelajaran yang mengacu pada

standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. *Teaching Factory* (TEFA) menjadi konsep pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri. Dengan *Teaching Factory*, peserta didik dapat belajar dan menguasai keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri sesungguhnya. Peserta didik akan menjadi lulusan yang terampil dan dengan demikian akan menjadi tenaga kerja industri yang kompeten yang pada akhirnya dapat mewujudkan sasaran organisasi BPSDMI maupun Kementerian Perindustrian yakni Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.

Oleh karena PTKI Medan yang berlokasi di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, maka PTKI Medan memiliki tantangan sekaligus peluang sebagai penyelenggara Pendidikan vokasi dengan bidang spesialisasi vokasi Industri Pengolahan Kelapa sawit dan Produk Hilir Kelapa Sawit. Besarnya potensi industry sawit di Sumatera Utara khususnya dan Pulau Sumatera umumnya menjadi peluang besar yang harus diambil oleh PTKI Medan. Industri kelapa sawit dan hilir kelapa sawit tentunya membutuhkan dukungan SDM industry, dan peran PTKI Medan adalah menyediakan tenaga kerja industri kompeten sesuai dengan kebutuhan industri yakni bidang Industri Pengolahan Kelapa sawit dan Produk Hilir Kelapa Sawit.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN

II.1. Visi PTKI Medan 2020-2024

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI. Untuk mewujudkan visi Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh, maka PTKI Medan menetapkan visi sebagai berikut: "sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri kimia, serta industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2030".

II.2. Misi PTKI Medan 2020-2024

Politeknik Teknologi Kimia Industri memiliki misi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global;
b. melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri kimia, serta industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya;
c. melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM);
d. mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai Satelit Pusat Inovasi Digital Industri (PIDI);
e. membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
f. mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
g. mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri *(tailor made)*.

II.3. Tujuan PTKI Medan 2020-2024

Adapun tujuan PTKI Medan adalah "Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh." Dengan indikator tujuan tersedianya SDM Industri yang kompeten. Adapun target jumlah tenaga kerja industri yang kompeten selama periode 5 (lima) tahun yang akan dihasilkan oleh PTKI Medan melalui jumlah lulusan dari tahun

2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut yakni 330 orang, 333 orang, 400 orang, 330 orang, dan 330 orang.

Pada tahun 2022 jumlah lulusan paling tinggi, hal ini berdasarkan data jumlah mahasiswa yang kelulusannya tidak tepat waktu cukup besar terutama pada program studi Teknik Mekanika yang kemudian akan lulus di tahun 2022. Selain itu, PTKI Medan telah melaksanakan program pendidikan vokasi setara D1 yang dimulai tahun 2021 sebanyak dua kelas dengan jumlah total mahasiswa 50 orang, dan program ini selesai di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2022 dan berikutnya program pendidikan vokasi setara D1 direncanakan akan dilaksanakan untuk satu kelas saja dengan rencana jumlah mahasiswa sampai dengan 30 orang. Selain itu, pada tahun 2023 dan 2024 jumlah target tidak meningkat oleh karena mulai tahun 2019 program studi Agribisnis Kelapa Sawit telah menerapkan dual system yang berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan. Tahun 2021 program studi Teknik Kimia juga telah menerapkan dual system. Dalam sistem pembelajaran sebelumnya (sistem regular) jumlah rata-rata mahasiswa yang diterima dalam kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah 50 orang/kelas, sementara untuk kelas dual system jumlah rata-rata mahasiswa baru yang diterima adalah 35 orang/kelas. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan.

II.4. Sasaran Strategis PTKI Medan 2020-2024

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“. Dalam peta strategi Kementerian Perindustrian digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Sasaran Kegiatan di PTKI Medan dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni:

Sasaran kegiatan PTKI Medan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh PTKI Medan sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PTKI Medan. Dalam penyusunannya, PTKI Medan menjabarkan masing-masing sasaran kegiatan dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective,* dan *learning and growth perspective*. Sasaran kegiatan tersebut diukur melalui indikator kinerja kegiatan. Terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan di PTKI Medan, dimana pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Dari tiga belas indikator kinerja tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU).

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja PTKI Medan Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			Satuan
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan NonMigas	1	**Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan**	***Indikator Kinerja Utama***	Persen
		2	Tenaga kerja industri yang kompeten		Orang
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	**Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi**	***Indikator Kinerja Utama***	Implementasi
SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat		Perusahaan
		2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional		Publikasi
		3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik		Nilai
		4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh		Tenant
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	**Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa**	***Indikator Kinerja Utama***	Persen
SK 5	Terwujudnya birokrasi Politeknik Teknologi Kimia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan		Nilai
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah		Nilai
SK 6	Terwujudnya ASN Politeknik Teknologi Kimia Industri yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN		Indeks
SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		Persen
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)		Indeks

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM industri Pengolahan NonMigas

Dengan indikator kinerja:

1) Tenaga kerja industri yang kompeten

   Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten merupakan program ahli madya bidang teknik kimia, teknik mekanika, dan agribisnis kelapa sawit Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan. Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik aktif pada akhir tahun ajaran, dengan target selama tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1300, 1346, 1404, 1404, dan 1404 orang.

   Menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten menjadi tujuan organisasi PTKI Medan. Hal ini terkait dengan fungsi utama PTKI Medan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. PTKI Medan menjadi kampus pendidikan vokasi dengan bidang spesialisasi industri kelapa sawit dan turunannya. Tugas PTKI Medan adalah menghasilkan

lulusan yang akan menjadi tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri kelapa sawit dan produk hilir kelapa sawit. Dengan demikian akan dapat mewujudkan peningkatan peran SDM industri dalam perekonomian nasional.

2) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan dihitung dari jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Target PTKI Medan selama 5 tahun yakni tahun 2020-2024 adalah sebesar 50%, 83%, 85%, 86%, dan 87%.

Keberhasilan pelaksanaan tugas PTKI Medan terutama diukur dari serapan lulusan (alumni) PTKI Medan. Kurikulum yang diterapkan dalam proses pendidikan di PTKI Medan merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Lulusan yang dihasilkan PTKI Medan jika memiliki kompetensi sesuai dengan yang telah direncanakan maka tingkat serapan lulusan akan tinggi. Oleh karena itu, indikator "Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan" menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) PTKI Medan.

PERSPEKTIF CUSTOMER

Sasaran Kegiatan 2 : Penguatan Implementasi Making Industri 4.0

Dengan Indikator Kinerja:

1) Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi

Jenis-jenis implementasi industry 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah: Pembangunan Satelit PIDI, Implementasi Kurikulum industri 4.0, Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan, dan Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri. Target yang ditetapkan PTKI Medan setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1 implementasi per tahun.

2) Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan Pendidikan, termasuk PTKI Medan. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. PTKI Medan sebagai satuan kerja di

Kementerian Perindustrian memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan inisiatif "Making Indonesia 4.0". Oleh karena itu, indikator "Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi " juga menjadi indikator kinerja utama (IKU) PTKI Medan.

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS

Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dengan indikator kinerja:

1) Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

   Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri pada PTKI Medan adalah: Pendampingan teknologi, Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan konsultasi industri, Penyuluhan, serta Pemanfaatan Workshop/Laboratorium/Teaching Factory. Target yang ditetapkan PTKI Medan setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1 perusahaan per tahun dan target ini meningkat di tahun 2024 sebanyak 2 perusahaan.

2) Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional

   Target penerapan hasil penelitian oleh PTKI Medan adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional. Target yang ditetapkan PTKI Medan setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024 adalah sebanyak 4, 4, 5, 5, dan 6 publikasi hasil penelitian.

3) Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

   Nilai minimum akreditasi program studi merupakan Nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Ketiga Program Studi di PTKI Medan, yakni Teknik Kimia, Teknik Mekanika dan Agribisnis Kelapa Sawit baru melaksanakan reakreditasi tahun 2021, oleh karena itu sampai dengan tahun 2023 belum akan melaksanakan reakreditasi. Oleh karena itu yang dicantumkan dalam target nilai akreditasi adalah nilai akreditasi terkecil yang ada di PTKI Medan, tahun 2020-2024 yakni: 300, 300, 306, 306, dan 306. Namun demikian upaya untuk peningkatan nilai akreditasi ini tetap dilakukan yakni melalui penetapan target kinerja individu berupa target nilai (skor) dalam Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI setiap tahunnya merupakan persiapan untuk reakreditasi, penetapan target hasil Audit Mutu Internal yang meningkat setiap tahun merupakan rupaya persiapan untuk reakreditasi.

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Dengan indikator kinerja:

1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

   Merupakan nilai capaian kinerja berupa Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PTKI Medan. Adapun target mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 50%, 60%, 70%, dan 80%.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu sasaran dalam RIPIN tahun 2015-2035. Negara sebagai Pembina industri dalam negeri bertanggung jawab dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri dalam negeri. Oleh karena itu salah satu tugas Kementerian Perindustrian adalah mewujudkan kebijakan pemberdayaan industri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Tugas ini juga diamanatkan kepada seluruh satuan kerja di bawah naungan Kementerian perindustrian, termasuk PTKI Medan. Oleh karena itu, indikator "Nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa" menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) PTKI Medan.

Sasaran Kegiatan 5 : Terwujudnya Birokrasi Politeknsik Teknoogi Kimia Industri yang Efektif, efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Dengan indikator kinerja:

1) Nilai Laporan Keuangan

   Penilaian Laporan Keuangan dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon). Adapun target tahun 2020-2024 adalah nilai Laporan Keuangan 70, 70, 70, 72, dan 74.

2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

   Perhitungan nilai SAKIP PTKI Medan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Target PTKI Medan untuk nilai SAKIP tahun 2020-2024 secara berurutan adalah 70, 70, 70, 72, dan 74.

Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya ASN Politeknik Teknologi Kimia Industri yang Profesional dan Berkepribadian

Dengan indikator kinerja:

1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

   Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk target yang ditetapkan PTKI Medan tahun 2020-2024 adalah Indeks Profesionalitas ASN 470, 71, 73, 76, dan 80.

Sasaran Kegiatan 7 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Dengan indikator kinerja utama, yaitu :

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti

   Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Untuk target yang ditetapkan PTKI Medan selaras dengan target Kementerian Perindustrian RI yakni tahun 2020-2024 secara berurutan adalah 91%, 91,5%, 92%, 92,5% dan 93%.

2) Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

   Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Untuk target yang ditetapkan PTKI Medan selaras dengan target Kementerian Perindustrian RI yakni tahun 2020-2024 secara berurutan adalah level 3, 3, 3, 4, dan 4.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024

Untuk Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri, BPSDMI menetapkan visi Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian yakni menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.

Seluruh Politeknik dan Akademi Komunitas Industri di bawah BPSDMI memiliki visi dan misi yang sama yakni:

Visi: Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi industri yang excellence dan berdaya saing global

Misi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dual system dengan STEM learning model berstandar global;

b. Melaksanakan Penelitian Terapan problem solving sektor industri prioritas;

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan industri;

d. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0;

e. Membangun dan mengembangkan kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan stakeholder terkait;

f. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP; dan

g. Mengembangkan kelas industri.

Kebijakan Pengembangan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan dual system dengan STEM learning model berstandar global

a) Pendidikan Dual System

Pendidikan sistem ganda (dual system education) menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggungjawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tinggi (high skilled & know how), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri.

Paradigma lama yang menempatkan industri pada bagian akhir yang menerima lulusan harus diubah sehinggga industri dapat berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan system pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di kampus, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan. Tahapan yang wajib dilakukan untuk bisa mengembangkan dual system education (Pendidikan Sistem Ganda), yakni:

(1) Peningkatan Kerja sama dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
(2) Penerapan kurikulum link and match dengan industri,
(3) Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran
(4) Penerapan teaching factory/teaching industry.
(5) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi
(6) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, antara lain
(7) Pengembangan laboratorium teaching factory dan workshop terintegrasi
(8) Pengembangan Smart dan cyber campus
(9) Pengembangan Program Studi Baru

b) Model Pembelajaran STEM

Penerapan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Learning Model dalam perkuliahan/ pembelajaran dapat mendorong mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif dan afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

STEM telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Finlandia, Australia, dan Singapura. STEM merupakan inisiatif dari National Science Foundation. Tujuan dari penerapan STEM di Amerika Serikat ialah untuk menjadikan keempat bidang ini (Science, Technology, Engineering and Mathematics) menjadi pilihan karier utama bagi mahasiswa. Paparan perbedaan masing-masing disiplin ilmu yang membangun pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic), yakni: (1) Science: Sains merupakan kajian berhubungan dengan peristiwa alam yang melibatkan penyelidikan, penelitian dan pengukuran untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena alam. Penyelidikan dan penilitian sains dapat digunakan untuk mengidentifikasi bukti – bukti yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan menjawab

permasalahan dalam kehidupan manusia. (2) Technology: Inovasi atau penemuan manusia yang dapat berupa perangkat lunak dan keras sebagai sarana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia untuk kehidupan yang lebih maju. (3) Engineering: Pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengaplikasikan, mereplikasi serta merekayasa sebuah karya berupa peralatan, sistem dan mesin yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi terhadap barang dan jasa. (4) Mathematic: Ilmu yang berhubungan dengan numerasi, pola perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk. Keterampilan berpikir secara rasional dan logis serta bernalar, dan menggunakannya secara sistematik dan terstruktur.

Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis STEM yang mengintegrasikan 4 bidang dalam sekali pengalaman belajar, maka perlu diterapkan melalui model pembelajaran yang berbasis proyek, karena STEM mengisyaratkan adanya output berupa karya desain dalam setiap pembelajarannya.

c) Pengembangan pendidikan berstandar global

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan Vokasi (Politeknik) di Indonesia hanya berkisar 5,2%, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, khususnya di eropa yang mencapai 35% sampai dengan 70%. Demikian juga, jumlah politeknik di Indonesia hanya berkisar 6% dari total jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sebagai acuan untuk mengukur kualitas pada setiap tahapan dapat digunakan indikator rangking dari QS Top Universities. Meskipun secara umum mayoritas pendidikan tinggi yang dinilai dalam pemeringkatan adalah universitas, beberapa Politeknik juga masuk dalam rangking yang berarti indikator rangking dapat digunakan secara general baik oleh universitas maupun Politeknik. Secara global terdapat badan-badan akreditasi/sertifikasi yang dapat diacu oleh program studi. Mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, ASIIN dan ABET adalah badan akreditasi internasional yang banyak digunakan di Indonesia. Saat ini, BPSDMI telah melakukan kerja sama dengan ASIIN untuk melakukan sertifikasi program studi atau institusi pada Politeknik/Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaannya, Politeknik/Akademi Komunitas akan didorong untuk mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN dengan tahapan, yaitu: (1) tahap evaluasi dan sertifikasi institusional, (2) workshop dan pelatihan dan (3) sertifikasi, dan (4) tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan).

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan khususnya Politeknik/Akademi Komunitas untuk lebih dipercaya oleh masyarakat adalah: a. memperoleh akreditasi sekolah “A”; b. akreditasi Perpustakaan; c. mempertahankan sertifikat SMM ISO 9001:2015; d. mengupayakan sertifikat lainnya untuk sekolah (Sertifikat Sistem Manajemen K3, ISO 19025 dsb); e. mengupayakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 (sebagai upaya komitmen Pembangunan Zona

Integritas). f. melaksanakan sertifikasi kompetensi lulusan dari LSP P1/LSP P3; dan g. melaksanakan sertifikasi internasional dari industri untuk mahasiswa dan dosen.

b. Melaksanakan Penelitian Terapan problem solving leading sector industri prioritas

1) Penelitian terapan untuk problem solving 7 (tujuh) sektor industri prioritas

Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Terdapat 7 (tujuh) sektor industri prioritas yang ditargetkan yaitu: 1) industri pangan; 2) Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telemtika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri. Dengan demikian, sekolah menengah dan perguruan tinggi nantinya bisa menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan memadai untuk memasuki dunia kerja.

2) Implementasi hasil penelitian di industri

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanotechnology, biotechnology, information technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015).

3) Perolehan HAKI dan paten hasil penelitian

Program Penelitian pada Politeknik dan Akademi Komunitas memiliki dengan 2 (dua) sasaran yaitu: a) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan b) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

4) Perolehan paten hasil penelitian

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor mupun varietas hasil pemuliaan.

Hak kekayaan intelektual terdiri atas Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

5) Publikasi hasil penelitian pada Jurnal Internasional

Jurnal Internasional adalah jurnal hasil dan publikasikan pada jurnal yang memenuhi syarat jurnal internasional dan bisa korespondensi keasliannya. Dengan kata lain jurnal internasional menjadi pembeda dari jurnal lainnya karena mempunyai tingkatan yang lebih global dari dengan jurnal nasional.

6) Kompetisi Nasional untuk inovasi vokasi industri

Kompetisi Nasional untuk Inovasi Vokasi Industri adalah kegiatan kompetisi mahasiswa yang memiliki proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Suatu perubahan berupa ide, gagasan, praktik atau obyek yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ini akan mengakomodir bidang-bidang Mechatronics, Electrical Installations, Mechanical Engineering CAD, Fashion Technology, Electronics, Web Technology, Graphic Design Technology, IT Software Solutions for Business, IT Network Systems Administration, Mobile Robotics, Industrial Control, CNC Milling, Automobile Technology, Prototype Modelling, Welding, Cloud computing, Cyber security, IT Network Cabling, dan CNC Turning.

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (3) Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

d. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0

Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030.

Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan sekaligus menyiapkan Politeknik dan Akademi Komunitas sebagai showcase dan capability center industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah yang akan menjadi bagian (satelit) dari Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0).

e. Membangun kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi

Unit Pendidikan tinggi di Kementerian Perindustrian memiliki tugas tidak hanya menciptakan tenaga kerja kompeten akan tetapi juga menghasilkan wirausaha industri. Dengan demikian unit Pendidikan tinggi perlu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Balai Diklat Industri, Asosiasi Industri, dan pihak terkait lainnya.

Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis di Perguruan Tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki prospektif usaha.

f. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP

Saat ini hampir seluruh Politeknik dan Akademi Komunitas telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan.

g. Mengembangkan kelas industri

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1/D2 dan kelas khusus program pendidikan D3/D4.

III.2. Arah Kebijakan PTKI Medan 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM industri BPSDMI, PTKI Medan menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi industri dalam periode 2020-2024 yakni Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju *Corporate University* pada PTKI Medan.

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi memiliki proses bisnis seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

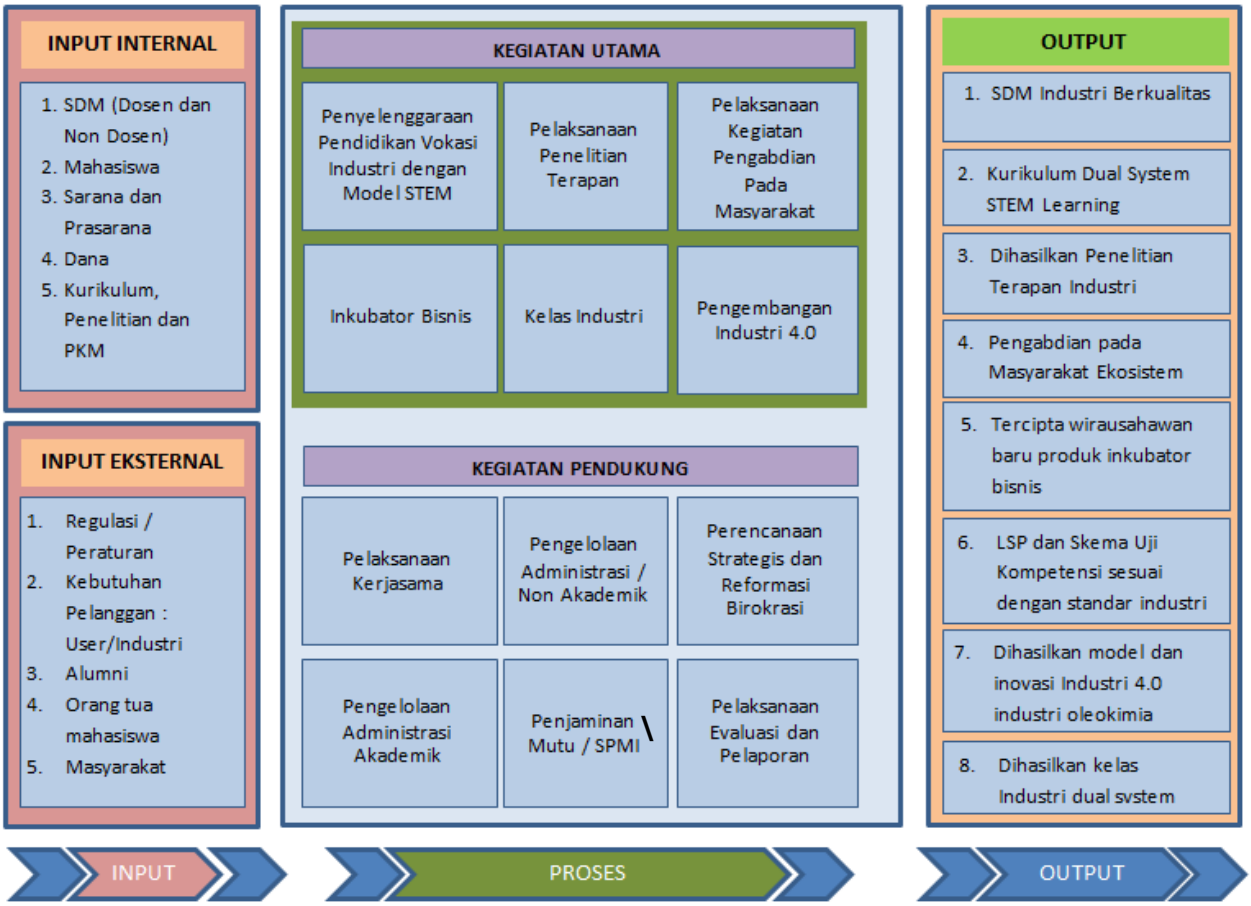

Gambar 3.1. Peta Proses Bisnis PTKI Corporate University

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dengan kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kurikulum memiliki potensi besar untuk mencapai Visi dan Misi sebagai kreator sumber daya manusia industri kompeten bertaraf global. Dengan mempertimbangkan kondisi existing dan kondisi yang diharapkan, terdapat beberapa langkah perbaikan dan perubahan. Kondisi existing, langkah perbaikan dan perubahan serta kondisi yang diharapkan ditunjukkan pada diagram berikut ini:

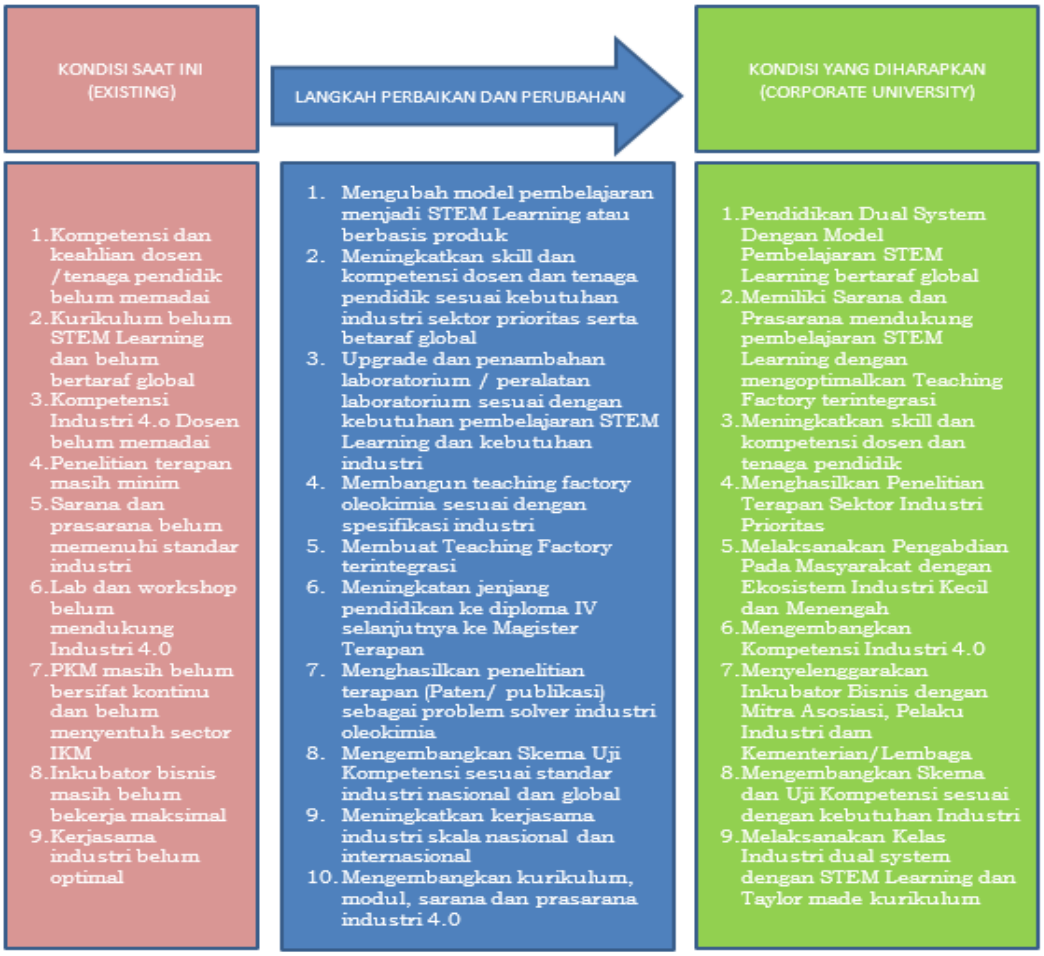

Gambar 3.2. Analisa Kondisi Saat Ini (Eksisting) dan Kondisi yang Diharapkan Menuju Corporate University

Pengembangan kelembagaan dan fungsi satuan kerja PTKI Medan meliputi:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
3. Membangun PTKI Medan sebagai *Center of Excellences* pembangunan Tenaga Kerja Industri terutama pada industri kelapa sawit dan turunannya;
4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *HUB* dan *Ecosystem Center* Industri 4.0;
5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
6. Membangun pusat pengembangan (*Development Center*) infrastruktur kompetensi industri;

7. Membangun wadah (*HUB Center*) sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dalam implementasi Corporate University pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, sesuai dengan bidang vokasi PTKI Medan, maka industri kelapa sawit dan industri hilir kelapa sawit yang akan menjadi industri mitra. Berdasarkan data produksi CPO di Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang mengalami peningkatan dengan tingkat produksi kedua Provinsi tersebut sebesar 34% dari total produksi nasional. Dari jumlah produksi yang cukup tinggi tersebut pasti membutuhkan SDM yang kompeten pada industri hulu dan hilir kelapa sawit. Dalam hal ini PTKI Medan akan mempersiapkan diri menggandeng perusahaan spesifik tersebut dan menciptakan kurikulum bersama industri sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam mencapai Corporate University, Politeknik Teknologi Kimia Industri menerapkan strategi. Strategi tersebut dapat tercapai apabili didukung oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga pendidik),
- kurikulum yang link and match dengan kebutuhan dunia industri dan
- sarana/prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, khususnya industri kelapa sawit dan turunannya.

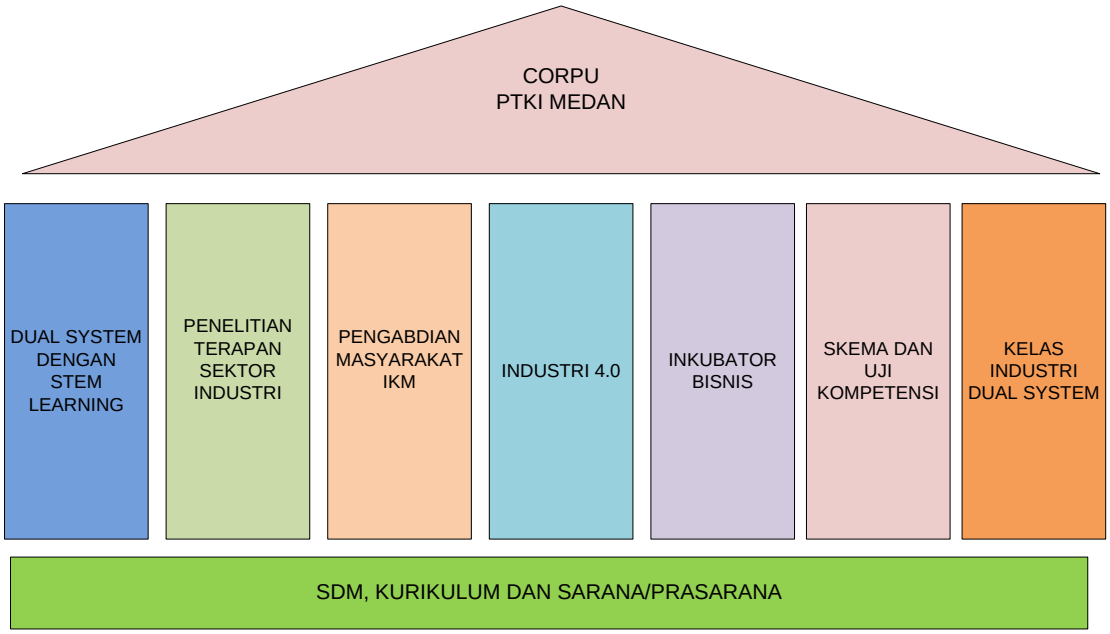

Gambar 3.3. Landasan dan Kebijakan Menuju CorpU

III.3. Kerangka Regulasi

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/10/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PTKI, peran ini menunjukkan bahwa PTKI merupakan unit pendukung tugas fungsi Kementerian Perindustrian sebagai salah satu *stakeholder* pengembangan industri di Indonesia. Hal ini juga menegaskan bahwa PTKI berada diposisi *entry point* proses pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang industri. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan rencana strategis PTKI Medan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian visi dan misi PTKI Medan. Bebrapa regulasi yang disusun dan ditetapkan oleh PTKI Medan selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi 2020-2024 PTKI Medan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur tentang Ukuran dan tata Cara Penggunaan Lambang	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
2	Tata Cara penggunaan bendera	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
3	Tata cara penggunaan hymne dan mars	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
4	Tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
5	Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
6	Pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
7	Penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
8	Kurikulum	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
9	Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
10	Penerimaan mahasiswa baru	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
11	Penelitian	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
12	Pengabdian kepada masyarakat	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
13	Etika akademik dan kode etik	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
14	Tata cara pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
15	Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
16	Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit dibawah direktur	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
17	Dewan penyantun	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
18	SPIP	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
19	Kewajiban dan Hak mahasiswa	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
20	Organisasi kemahasiswaan dan Kewajiban kemahasiswaan	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
21	SPMI	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
22	Tata cara penetapan internal dan keputusan internal	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022
23	Keringanan SPP	Statuta Politeknik	PTKI Medan	BPSDMI dan Politeknik AKOM	2022

III.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/10/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan,

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Pada tahun 2018 terdapat perubahan pada Kementerian Perindustrian, termasuk perubahan struktur organisasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018. Sejak adanya perubahan tersebut, PTKI Medan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri (PPKVI) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri. Peran strategis PTKI Medan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan di bidang industri.

Sesuai perkembangan dalam program Reformasi Pembangunan Industri Nasional, serta kebijakan Kementerian Perindustrian yaitu Pengembangan Usaha Kecil Menengah Industri maupun tuntutan kebutuhan Dunia Kerja yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, arah pembangunan PTKI-Medan diprioritaskan pada Peningkatan Komoditas dan Sumber Daya Manusia Industrial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/10/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PTKI, maka peta struktur organisasi PTKI dapat dilihat pada gambar berikut:

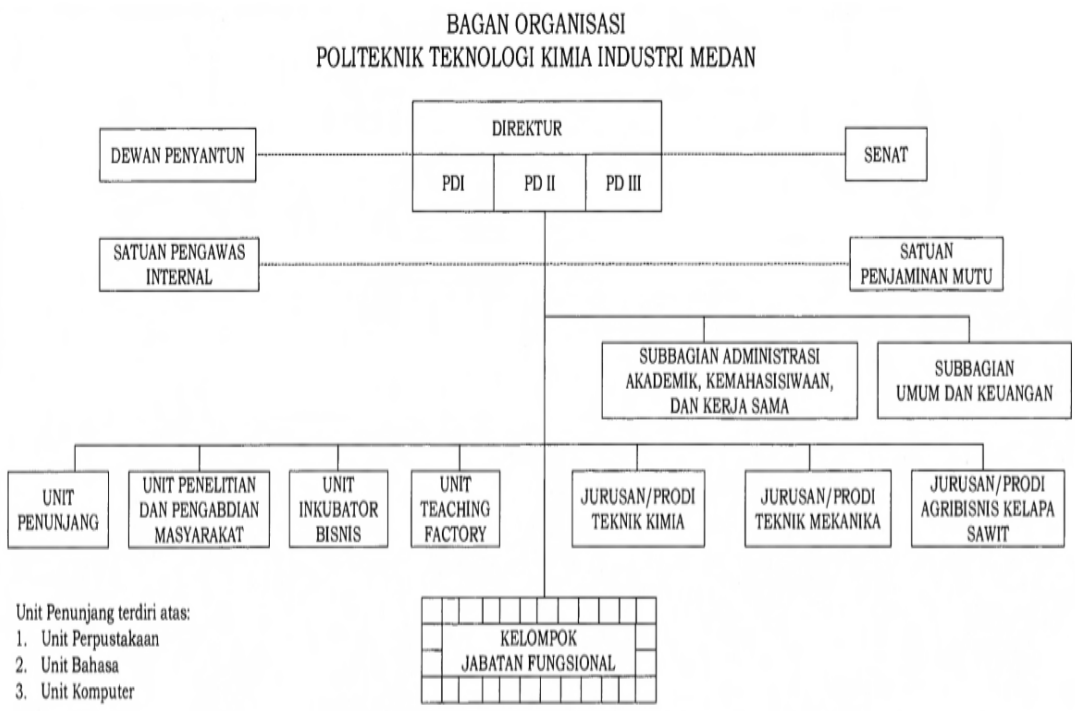

Gambar 3.4. Struktur Organisasi PTKI Medan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV. 1. Target Kinerja

Adapun target kinerja PTKI Medan tahun 2020-2024 seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Target Kinerja PTKI Medan

TUJUAN									
Kode	**Tujuan**	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Target**				
					2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional		Tersedianya SDM Industri yang kompeten	orang	330	333	400	330	330
SASARAN									
Kode	**Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan**		**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**				
					2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan NonMigas	1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	83	85	86	87
		2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	1300	1346	1404	1404	1404
PERSPEKTIF *CUSTOMER*									
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	1	1	1	2
PERSPEKTIF *INTERNAL PROCESS*									
SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	1	1	1	1	1
		2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Publikasi	4	4	5	5	6
		3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	300 (B)	300 (B)	306 (B)	306 (B)	306 (B)

		4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	0	0	0	1	1
PERSPEKTIF *LEARN AND GROWTH*									
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	-	50	60	70	80
SK 5	Terwujudnya birokrasi Politeknik Teknologi Kimia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	70	70	70	72	74
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Nilai	70	70	70	72	74
SK 6	Terwujudnya ASN Politeknik Teknologi Kimia Industri yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	71	73	76	80
SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	3	3	3	4	4

IV. 2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020—2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran PTKI Medan tahun 2020—2024 adalah:

Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan PTKI Medan Tahun 2020-2024

Dalam ribu rupiah

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian		**Rp 18.509.785**	**Rp 21,109,426**	**Rp. 24.852.856**	**Rp. 29.400.752**
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		**Rp 6.173.076**	**Rp 7,797,863**	**Rp. 9.657.727**	**Rp. 13.274.317**
TOTAL		**Rp Rp.25,009,795**	**Rp 28.907.289**	**Rp 24.682.861**	**Rp. 34.510.583**	**Rp.43.126.769**

Berikut ditampilkan keterkaitan antara perencanaan anggaran di PTKI Medan dengan rencana kinerja.

Tabel 4.3. Perencanaan Anggaran untuk Mendukung Rencana Kinerja PTKI Medan

No	Rencana Kinerja	Perencanaan Anggaran dalam Rincian Kertas Kerja Satker			
		Nama Program/Kegiatan Terkait	Kode	Nama Komponen	Nama Sub Komponen
1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	4958.FAI.001	Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Non-Pendidikan	HRD Club / Pertemuan Industri
		Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	4958.SAG.001	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	Tracer Study
2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.RBJ.002	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	Pengadaan Peralatan Pendidikan
		Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	4958.SAG.001	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	Kegiatan Promosi PTKI
					Penerimaan Mahasiswa Baru
					Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan
					Pelaksanaan ujian Semester/Karya Akhir/Semester Pendek
					Dies Natalis/Wisuda
					Kuliah Umum
					Pelaksanaan Prakerin Dual Sistem
					Melaksanakan Sertifikasi Lulusan
		Mahasiswa dan Lulusan Program D I dan D II Berbasis Kompetensi	4958.SAG.002	Menyelenggarakan Program Pendidikan D1-D2 Industri	Penyelenggaraan D1
				Melaksanakan Sertifikasi Lulusan	Pengembangan Skema dan Pelaksanaan Uji Kompetens
		Layanan Perkantoran Politeknik Industri	6043.EAA.002	Operasional perkantoran dan Honor Pengelola	Operasional perkantoran dan Honor Pengelola
				Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	4958.SAG.001	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	Pilot Project Dual Sistem
4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	4958.FAI.001	Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat	Pengabdian bagi Masyarakat
5	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	4958.FAI.001	Menyelenggarakan Penelitian Teknis Industri Terapan	Penelitian Ilmiah Workshop Penulisan Karya Ilmiah
6	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	4958.SAG.001	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	Kegiatan SPMI
7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	4958.SAG.001	Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	Menyelenggarakan Inkubator Bisnis
8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.RBJ.002	Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	Pengadaan Peralatan Pendidikan
9	Nilai Laporan Keuangan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri	6043.EAB.002	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri	6043.EAB.002	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Penyusunan SAKIP
11	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	4958.FAI.001	Menyelenggarakan Rintisan Gelar Dosen	Rintisan Gelar Diklat Peningkatan SDM
12	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri	6043.EAB.002	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	
13			6043.EAB.002		Kegiatan SPIP

	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rintisan ZI Menuju WBBM
					Pelayanan Publik

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis PTKI Medan tahun 2020 – 2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun dan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 – 2024 serta bersesuaian dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis PTKI Medan akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra PTKI Medan merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi PTKI Medan dalam mewujudkan visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi BPSDMI. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI. Untuk mewujudkan visi Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh, maka PTKI Medan telah menetapkan visi: “sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri kimia, serta industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2030.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, PTKI Medan telah menetapkan sasaran-sasaran kegiatan yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. PTKI Medan juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran kegiatan dapat terukur dan dimonitor.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1a. POHON KINERJA PTKI MEDAN

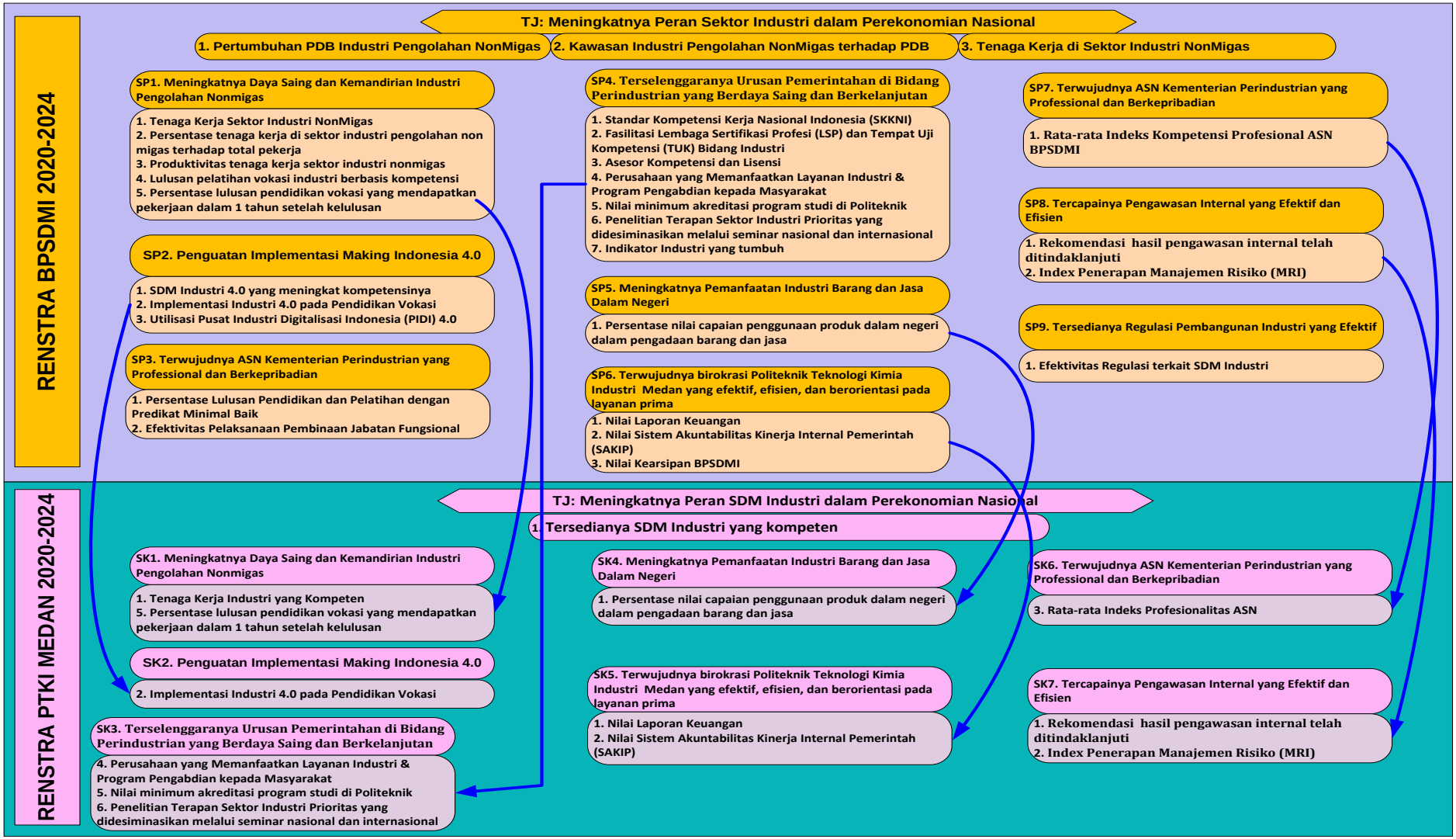

LAMPIRAN 1b. CASCADING KINERJA PADA PTKI MEDAN

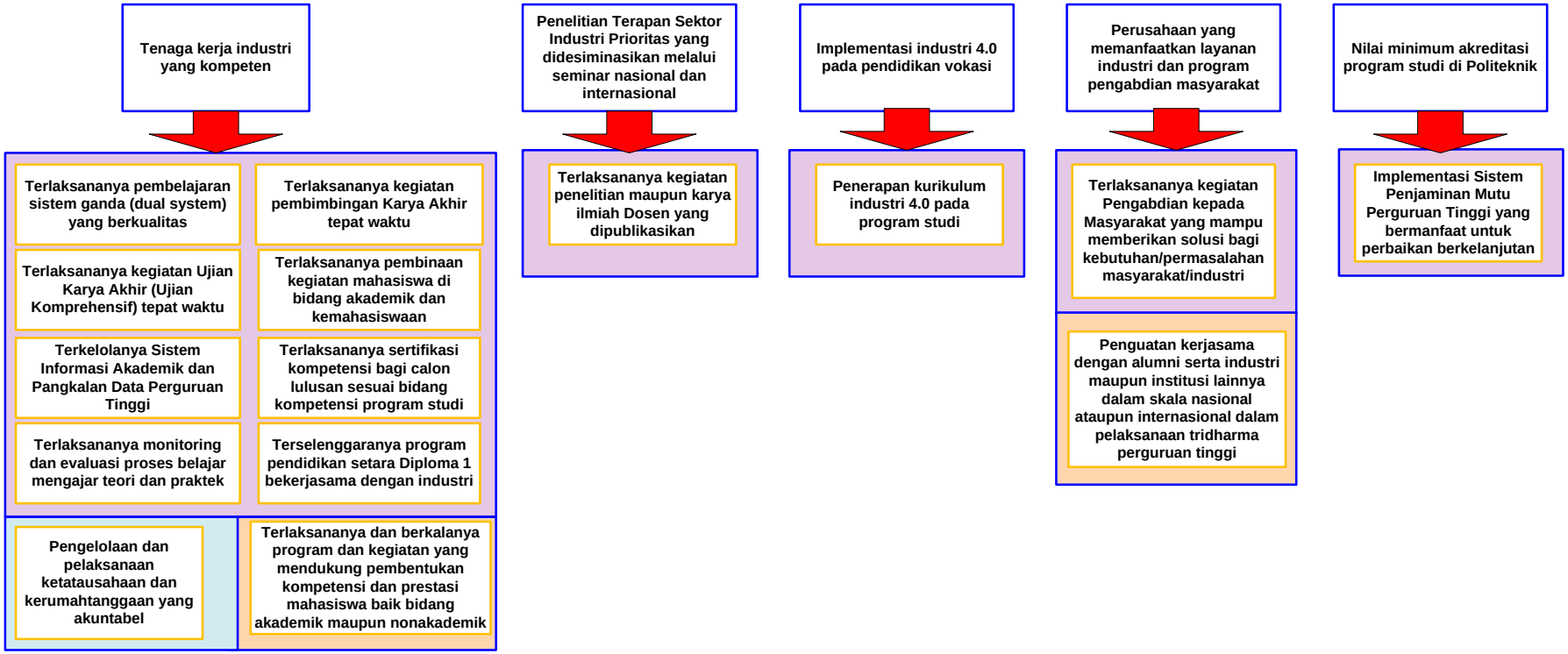

Keterangan:

TIM KERJA II	TIM KERJA I	TIM KERJA III

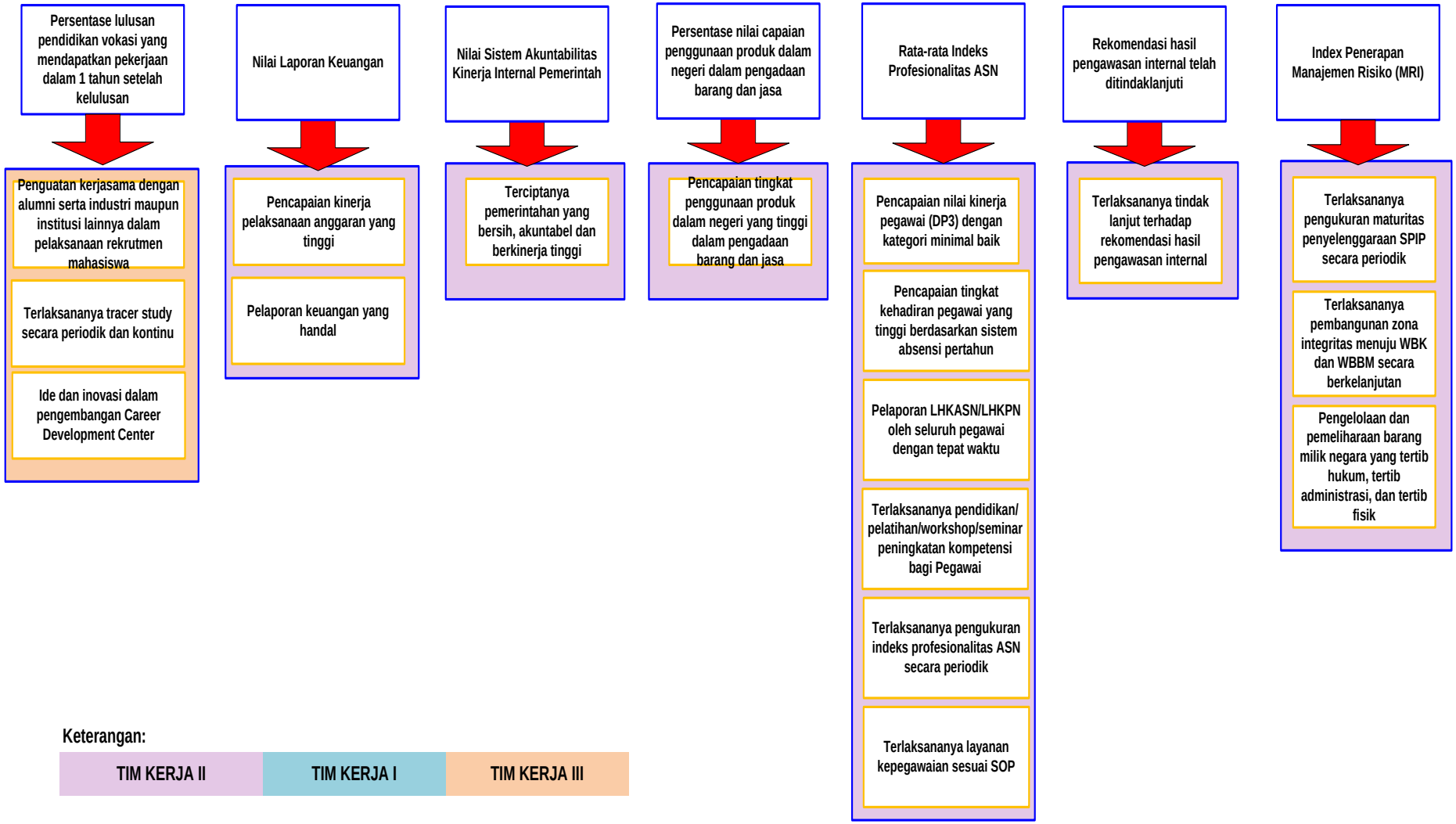
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
Penguatan kerjasama dengan alumni serta industri maupun institusi lainnya dalam pelaksanaan rekrutmen mahasiswa
Terlaksananya tracer study secara periodik dan kontinu
Ide dan inovasi dalam pengembangan Career Development Center
Nilai Laporan Keuangan
Pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang tinggi
Pelaporan keuangan yang handal
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah
Terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
Pencapaian tingkat penggunaan produk dalam negeri yang tinggi dalam pengadaan barang dan jasa
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
Pencapaian nilai kinerja pegawai (DP3) dengan kategori minimal baik
Pencapaian tingkat kehadiran pegawai yang tinggi berdasarkan sistem absensi pertahun
Pelaporan LHKASN/LHKPN oleh seluruh pegawai dengan tepat waktu
Terlaksananya pendidikan/ pelatihan/workshop/seminar peningkatan kompetensi bagi Pegawai
Terlaksananya pengukuran indeks profesionalitas ASN secara periodik
Terlaksananya layanan kepegawaian sesuai SOP
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti
Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal
Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
Terlaksananya pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP secara periodik
Terlaksananya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM secara berkelanjutan
Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara yang tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik
Keterangan:
TIM KERJA II
TIM KERJA I
TIM KERJA III

LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi dalam Ribu Rupiah				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN													
SK 1	**Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan NonMigas**												
	1	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	1300	1340	1400	1400	1400	7.486.721	8.370.987	9.233.913		
									(16.067.869)*	(14.967.241)*	(17.491.556)*		
	2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	83	85	86	87	103.600	63.563	470.898		
SK 2	**Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**												
	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	1	1	1	2	51.375	0	0	0	0
SK 3	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**												
	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/Industri	1	1	1	1	2	115.080	159.076	251.799		
	2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Jumlah Publikasi	4	4	5	5	6	-	323.850	384.550		
	3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	311 (B)	311 (B)	311 (B)	311 (B)	316 (B)	17.500	103.413	51.177	-	
SK 4	**Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**												
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	-	50	60	70	80	74.160	76.320	54.216		
SK 5	**Terwujudnya birokrasi Politeknik Teknologi Kimia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**												

	1	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	70	70	70	72	74	205.920	216.880	295680		
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Nilai	70	70	70	71	72	1.000	2.700	25.800		
SK 6	**Terwujudnya ASN Politeknik Teknologi Kimia Industri yang Professional dan Berkepribadian**												
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	71	73	76	80	668.680	199.566	233.800		
SK 7	**Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**												
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93	119.880	128.640	70.416		
	2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3	3	3	4	4	98.010	70.625	423.500		
	Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi											1.040.000	1.352.000
	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri)											15.860.000	20.061.800
	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri)											9.605.000	12.486.500
	Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi)											7.192.727	10.069.817
	Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Mahasiswa dan Lulusan Program D I dan D II Berbasis Kompetensi)											1.425.000	1.852.500
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri)											580.500	725.625
	Layanan Sarana Internal (Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri)											3.400.000	4.760.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal **Gaji dan Tunjangan** **Operasional Kantor**											 20.022.356 4.250.000	 24.026.827 5.100.000

*Ket: *Gaji dan Tunjangan*

LAMPIRAN 3. MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, KRO, RO, INDIKATOR KINERJA, DAN SASARAN STRATEGIS

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									
Sasaran Strategis	**SS1**	**Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas**							
Indikator Kinerja SS	**SS1.1**	**Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas**	**BPSDMI**	**Juta Orang**	**17,44**	**18,29**	**20,84**	**21,34**	**21,94**
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Set BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Set BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Indikator Kinerja SS	**SS1.7**	**Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan**	**PPPVI**	**Persen**	**50**	**77**	**79**	**81**	**83**
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	PPPVI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Indikator Kinerja SS	**SS1.8**	**Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi**	**Pusdiklat Industri**	**Orang**	**17.000**	**43.000**	**27.600**	**95.000**	**100.000**
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	3580	4.900	20.000	20.000	20.000
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	810	480	5.000	18.000	19.000
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	BDI	Orang	16.190	42.520	22.600	77.000	81.000
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Tenaga kerja industri yang kompeten	SMK dan Poltek	Orang	23.820	23.920	24.070	24.320	23.920
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.3	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	SMK dan Poltek	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Strategis	**SS2**	**Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**							

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	**SS2.5**	**SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya**	**Pusdiklat SDM Industri**	**Orang**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	21	21	21	21	21
Sasaran Kegiatan	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	1	3	5	7	9
Sasaran Kegiatan	SK3	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	SMK dan Poltek						
Sasaran Strategis	**SS3**	**Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri**							
Indikator Kinerja SS	**SS3.1**	**Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin**	**Semua Unit Eselon I**	**Persen**	**-**	**75**	**80**	**85**	**90**
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Set BPSDMI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Set BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Pusdiklat Industri	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	PPPVI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	BDI, SMK dan Poltek	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Strategis	**SS8**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan**							
Indikator Kinerja SS	**SS8.2**	**Infrastruktur kompetensi industri**	**Pusdiklat SDM Industri**	**SKKNI**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sasaran Program	SP4	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri	BPSDMI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan	4	6	8	10	12
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	SMK dan Poltek	Perusahaan/ Industri	4	6	11	13	15
Indikator Kinerja Program	SP4.5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Poltek	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Indikator Kinerja Program	SP4.6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Poltek	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.5	Inkubator industri yang tumbuh	BDI dan Poltek	Tenant	41	34	50	60	70
Sasaran Strategis	**SS9**	**Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**							
Indikator Kinerja SS	**SS9.2**	**Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**	**Semua Unit Eselon I**	**Persen**	**91**	**91,5**	**92**	**92,5**	**93**

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Pusdiklat Industri	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	PPPVI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Indikator Kinerja SS	**SS9.3**	**Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian**	**Semua Unit Eselon I**	**Level**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Set BPSDMI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Set BPSDMI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Strategis	**SS10**	**Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian**							
Indikator Kinerja SS	**SS10.1**	**Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin**	**Set BPSDMI**	**Indeks**	**70**	**71**	**73**	**76**	**80**
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP7.1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Pusbindiklat SDM Aparatur	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Program	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Pusdiklat Industri						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SK5.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Pusdiklat Industri	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.3	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Pusbindiklat SDM Aparatur	Pusbindiklat SDM Aparatur	Nilai	-	71	73	76	80
Sasaran Strategis	**SS13**	**Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel**							
Indikator Kinerja SS	**SS13.2**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian**	**Seluruh Eselon II**	**Nilai**	**78**	**78,2**	**78,4**	**78,6**	**78,8**
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP7.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK3	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Set BPSDMI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK7.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI	Nilai	70	72	74	76	78

LAMPIRAN 4. PEDOMAN KINERJA RENSTRA POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan NonMigas							
IK 1.	Tenaga kerja industri yang kompeten		N. A.					
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Untuk mendukung program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI yakni "Program Pengembangan SDM Industri" maka PTKI telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Untuk mengakomodasi perspektif Pemangku kepentingan ditetapkan sasaran strategis yakni Tersedianya SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing global dengan indikator kinerja sasarannya diantaranya adalah "Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten". Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten merupakan program ahli madya bidang teknik kimia, teknik mekanika, dan agribisnis kelapa sawit Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan yang telah dinyatakan lulus dalam sidang Karya Akhir serta telah mengikuti dan dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP P1 PTKI Medan. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK) yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Indikator kinerja jumlah tenaga kerja industri yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik aktif tersebut pada akhir tahun ajaran dari setiap satuan kerja Pendidikan.							
	SUMBER DATA							
	Data pada sistem informasi akademik peserta didik PTKI Medan							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten = Jumlah peserta didik aktif pada akhir tahun ajaran							
SATUAN			KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Orang			Maksimisasi	Pembantu Direktur I				
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan NonMigas							

IK 2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan			50	83	85	85	87
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK) yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Indikator kinerja jumlah tenaga kerja industri yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik aktif tersebut pada akhir tahun ajaran dari setiap satuan kerja Pendidikan.							
	SUMBER DATA							
	Data persentase lulusan tahun sebelumnya dari PTKI Medan							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali 100%.							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen			Maksimasi		Pembantu Direktur III			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
IK 1.	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi		N. A	1	1	1	1	2
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan. Jenis-jenis implementasi industry 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Satelit PIDI 2. Implementasi Kurikulum industri 4.0 3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan 4. Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri.							
	SUMBER DATA							
	Data implementasi industri 4.0 pada PTKI Medan							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Jumlah implementasi							

SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA				
Implementasi			Maksimasi		Pembantu Direktur I				
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 3. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan								
IK 1.	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat								
	DEFINISI/DESKRIPSI								
	Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem industri, dilakukan kerja sama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini menjadi kebijakan penting bagi unit pendidikan dalam rangka untuk: 1. menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan industri maupun masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan; 2. pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret; 3. mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri pada Unit Pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Pendampingan teknologi; 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pelayanan konsultasi industri; 4. Penyuluhan; 5. Pemanfaatan Workshop/Laboratorium/Teaching Factory.								
	SUMBER DATA								
	Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan.								
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)								
	Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan di akhir tahun								
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA				
Perusahaan/Industri			Maksimasi		Pembantu Direktur I dan III				
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 3. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan								

IK 2.	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional			4	4	4	5	5
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian. Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh Politeknik dan Akademi Komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional.							
	SUMBER DATA							
	Data Artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Jumlah data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Publikasi Penelitian			Maksimasi		UPPM			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 3. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan							
IK 3.	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik		N. A.	311 (B)	311 (B)	311 (B)	311 (B)	311 (B)
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik adalah nilai rata-rata dari beberapa Nilai akreditasi program studi yang terdapat pada satker dan masih berlaku.							

	SUMBER DATA							
	Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan (SK) dari Lembaga akreditasi							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi							
SATUAN			SATUAN		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai			Maksimasi		Ketua Program Studi			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 3. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan							
IK 4.	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh		N. A.	-	-	1	1	1
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada balai diklat dan Pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha. Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di balai diklat dan Pendidikan tinggi, meliputi: 1. Tahap Pra Inkubasi 2. Tahap Inkubasi 3. Tahap Pasca Inkubasi Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan.							
	SUMBER DATA							
	Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis.							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Jumlah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan							
SATUAN			SATUAN		SATUAN			
Tenant			Maksimasi		PTKI Medan			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
IK 1.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			-	50	55	60	65
	DEFINISI/DESKRIPSI							

	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
	SUMBER DATA							
	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen			Maksimasi		PPK, Pejabat Pengadaan			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 5. Terwujudnya birokrasi Politeknik Teknologi Kimia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
IK 1.	Nilai Laporan Keuangan			70	70	70	76	78
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.							
	SUMBER DATA							
	Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan kementerian Perindustrian.							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon).							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai			Maksimasi		Ka. Subbag Umum & Keuangan			
Kode	Indikator Kinerja		Baseline	Target				

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	SK 5. Terwujudnya birokrasi Politeknik Teknologi Kimia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
IK 2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah			70	70	70	71	71
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.							
	SUMBER DATA							
	Data Nilai SAKIP PTKI Medan							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Perhitungan nilai SAKIP PTKI Medan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai			Maksimisasi		Pembantu Direktur II			
Kode	**Indikator Kinerja**		**Baseline 2019**	**Target**				
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	SK 6. Terwujudnya ASN Politeknik Teknologi Kimia Industri yang Professional dan Berkepribadian							
IK 1.	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN		N. A.	70	71	73	76	80
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN							
	SUMBER DATA							
	Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan PTKI Medan							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
SATUAN			KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Indeks			Maksimasi		Bagian Kepegawaian			

Kode	Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	SK 7. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
IK 1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti		90	91	91,5	92	92,5	93
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
	SUMBER DATA							
	Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, *database* Itjen							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
SATUAN			KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Persen			Maksimasi	PPK, PJB, Ka. Subbag. Umum & Keuangan				
Kode	**Indikator Kinerja**		**Baseline 2019**	**Target**				
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	SK 7. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
IK 2.	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)			3	3	3	3	4
	DEFINISI/DESKRIPSI							
	Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.							
	SUMBER DATA							
-	- Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil *Quality Assurance* oleh BPKP.							
	CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.		
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Level		Maksimasi	Pembantu Direktur II